



Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Aceh

Putri Syaikah Azaria¹, Muhammad Arifai², Ali Imran³

^{1,2,3}Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: azariaputrisyaikah@gmail.com¹, arifai_m@pnl.ac.id², ali.imr4n@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received August 16, 2026

Revised August 31, 2026

Accepted September 02, 2026

Keywords:

Regional Financial Efficiency;
PAD Effectiveness; Regional
Financial Independence;
Capital Expenditure Allocation

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the regional financial efficiency ratio, Regional Original Revenue (PAD) effectiveness ratio, and regional financial independence ratio on capital expenditure allocation in district/city governments in Aceh Province during 2019–2023. This study uses a quantitative causal-associative approach and secondary data from Budget Realization Reports (LRA) published by the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance. The population comprises 23 district/city governments, with 115 initial observations. After two outliers were excluded, 113 observations were analyzed. Data were analyzed using descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, t-test, F-test, and the coefficient of determination. The results show that the regional financial efficiency ratio has a negative and significant effect on capital expenditure allocation ($B = -0.250$; $t = -6.717$; $p < 0.001$). The PAD effectiveness ratio also has a negative and significant effect ($B = -0.130$; $t = -5.273$; $p < 0.001$), while the regional financial independence ratio has a negative and significant effect ($B = -0.437$; $t = -4.581$; $p < 0.001$). Simultaneously, the three variables significantly affect capital expenditure allocation ($F = 171.938$; $p < 0.001$). The model explains 82.6% of the variation in capital expenditure allocation, with an adjusted R^2 of 82.1%. The findings indicate that the quality and structure of regional financial management are important in explaining capital expenditure allocation in Aceh.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received August 16, 2026

Revised August 31, 2026

Accepted September 02, 2026

Kata Kunci:

Efisiensi Keuangan Daerah;
Efektivitas PAD; Kemandirian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama 2019–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Populasi penelitian mencakup 23 kabupaten/kota dengan 115 observasi awal. Setelah dua data outlier dikeluarkan, sebanyak 113 observasi digunakan dalam analisis. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi



Keuangan Daerah; Alokasi
Belanja Modal

linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal ($B = -0,250$; $t = -6,717$; $p < 0,001$). Rasio efektivitas PAD juga berpengaruh negatif dan signifikan ($B = -0,130$; $t = -5,273$; $p < 0,001$), sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan ($B = -0,437$; $t = -4,581$; $p < 0,001$). Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal ($F = 171,938$; $p < 0,001$). Model mampu menjelaskan 82,6% variasi alokasi belanja modal dengan Adjusted R^2 sebesar 82,1%. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas dan struktur pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam menjelaskan alokasi belanja modal di Aceh.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Putri Syaikh Azaria
Politeknik Negeri Lhokseumawe
E-mail: azariaputrisyaikh@gmail.com

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu penentu kemampuan pemerintah menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur secara berkelanjutan. Belanja modal memiliki posisi strategis karena digunakan untuk memperoleh atau membangun aset yang manfaatnya melampaui satu periode anggaran, sehingga berkaitan langsung dengan kapasitas pelayanan dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2021; Mahmudi, 2019).

Alokasi belanja modal tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan pembangunan, tetapi juga oleh kapasitas dan kinerja keuangan daerah. Efisiensi keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah mengendalikan pengeluaran relatif terhadap pendapatan. Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan merealisasikan PAD sesuai target, sedangkan kemandirian keuangan menggambarkan kemampuan daerah membiayai pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan sendiri. Ketiga indikator tersebut memberikan perspektif yang berbeda mengenai kondisi fiskal daerah dan dapat digunakan untuk menjelaskan variasi kebijakan belanja modal.

Konteks Provinsi Aceh menarik karena karakteristik fiskalnya dipengaruhi oleh desentralisasi dan skema otonomi khusus, sementara ketergantungan terhadap transfer antarpemerintahan masih menjadi persoalan pada banyak kabupaten/kota. Data penelitian menunjukkan adanya variasi rasio efisiensi, efektivitas PAD, kemandirian, dan proporsi belanja modal antar daerah dan antar tahun. Variasi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal yang lebih baik belum tentu diterjemahkan secara seragam ke dalam alokasi belanja modal.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Andirfa et al. (2016) menempatkan PAD sebagai faktor penting dalam kinerja keuangan daerah,



sedangkan Marlina et al. (2017) menemukan hubungan signifikan antara kemandirian keuangan dan belanja modal. Wahyuni dan Ardini (2018) melaporkan hubungan positif efektivitas PAD dengan belanja modal, sementara Kusumaningrum dan Sugiyanto (2021) menemukan bahwa kemandirian dapat berpengaruh negatif. Studi yang lebih baru juga menegaskan bahwa efisiensi, efektivitas pendapatan, dan kemandirian merupakan aspek penting dalam evaluasi keuangan pemerintah daerah (Hummel & Kusumasari, 2026; Sukma & Hendaris, 2026).

Atas dasar fenomena dan ketidakkonsistenan temuan tersebut, penelitian ini menguji pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, dan kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama 2019–2023. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang relevan bagi pengelolaan APBD dan penetapan prioritas belanja pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Objek penelitian adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Populasi terdiri atas 23 kabupaten/kota dan seluruhnya digunakan sebagai sampel dengan teknik total sampling. Periode pengamatan 2019–2023 menghasilkan 115 observasi awal. Berdasarkan hasil pemeriksaan outlier, dua observasi, yaitu Aceh Barat Daya tahun 2019 dan Aceh Selatan tahun 2020, dikeluarkan sehingga analisis akhir menggunakan 113 observasi.

Data penelitian merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang dipublikasikan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Variabel independen terdiri atas rasio efisiensi keuangan daerah (X_1), rasio efektivitas PAD (X_2), dan rasio kemandirian keuangan daerah (X_3). Variabel dependen adalah alokasi belanja modal (Y), yang diukur sebagai proporsi realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah.

Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD. Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer. Alokasi belanja modal dihitung dengan membandingkan realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah (Fathah, 2017; Anynda & Hermanto, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, regresi linear berganda, uji t , uji F , dan koefisien determinasi (R^2). Persamaan regresi yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$. Pengambilan keputusan hipotesis menggunakan tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efisiensi Keuangan Daerah	115	71,24	112,67	87,5782	9,62405
Efektivitas PAD	115	62,82	135,82	100,1217	15,50854
Kemandirian Keuangan Daerah	115	5,49	24,61	12,5991	4,01761



Alokasi Belanja Modal	115	[lihat skripsi]	[lihat skripsi]	[lihat skripsi]	[lihat skripsi]
-----------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sumber: hasil pengolahan data penelitian.

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 87,5782%, rata-rata efektivitas PAD sebesar 100,1217%, dan rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 12,5991%. Nilai rata-rata kemandirian yang relatif rendah menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masih memiliki ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Sementara itu, rata-rata efektivitas PAD berada sedikit di atas 100%, yang menunjukkan bahwa secara agregat realisasi PAD relatif mampu mencapai target yang ditetapkan.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model telah memenuhi uji normalitas dan tidak menunjukkan masalah multikolinearitas maupun heteroskedastisitas berdasarkan hasil pengolahan SPSS dalam skripsi. Nilai tolerance untuk X1, X2, dan X3 masing-masing sebesar 0,467; 0,400; dan 0,400, sedangkan VIF sebesar 2,142; 2,500; dan 2,503. Nilai tersebut masih berada pada batas yang digunakan dalam penelitian, sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang mengganggu estimasi koefisien.

Uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin–Watson sebesar 1,568. Nilai tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan autokorelasi positif apabila menggunakan batas umum 1,5–2,5. Karena data merupakan gabungan wilayah dan waktu, hasil ini perlu dibaca secara hati-hati. Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	62,516	2,555	—	24,469	0,000
Efisiensi (X1)	-0,250	0,037	-0,393	-6,717	0,000
Efektivitas PAD (X2)	-0,130	0,025	-0,334	-5,273	0,000
Kemandirian (X3)	-0,437	0,095	-0,290	-4,581	0,000

Persamaan regresi: $Y = 62,516 - 0,250X1 - 0,130X2 - 0,437X3 + e$.

Koefisien X1 sebesar -0,250 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan rasio efisiensi diikuti penurunan proporsi alokasi belanja modal sebesar 0,250 satuan, dengan variabel lain tetap. Karena rasio efisiensi yang lebih tinggi dalam definisi penelitian berarti belanja relatif lebih besar terhadap pendapatan, arah negatif dapat dipahami sebagai indikasi menyempitnya ruang fiskal untuk belanja modal ketika beban pengeluaran meningkat.

Koefisien X2 sebesar -0,130 menunjukkan hubungan negatif antara efektivitas PAD dan alokasi belanja modal. Temuan ini berarti peningkatan kemampuan mencapai target PAD tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan proporsi belanja modal. PAD yang



terrealisasi dapat terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban daerah lainnya.

Koefisien X_3 sebesar $-0,437$ menunjukkan hubungan negatif antara kemandirian keuangan dan alokasi belanja modal. Dalam model ini, peningkatan kemandirian tidak diikuti peningkatan proporsi belanja modal. Salah satu interpretasi yang mungkin adalah bahwa daerah dengan PAD relatif lebih kuat dapat memiliki struktur belanja yang lebih beragam, sementara proporsi belanja modal ditentukan pula oleh prioritas kebijakan dan komposisi belanja lainnya.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hasil statistik	Keputusan
H1: Efisiensi $\rightarrow$ Alokasi Belanja Modal	$t = -6,717$; Sig. = 0,000	Signifikan; arah negatif
H2: Efektivitas PAD $\rightarrow$ Alokasi Belanja Modal	$t = -5,273$; Sig. = 0,000	Signifikan; arah negatif
H3: Kemandirian $\rightarrow$ Alokasi Belanja Modal	$t = -4,581$; Sig. = 0,000	Signifikan; arah negatif
H4: $X_1, X_2, X_3 \rightarrow$ Alokasi Belanja Modal	$F = 171,938$; Sig. = 0,000	Signifikan secara simultan

Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Nilai R Square sebesar 0,826 dan Adjusted R Square sebesar 0,821 menunjukkan bahwa model menjelaskan 82,6% variasi alokasi belanja modal, sedangkan 17,4% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Daya jelas tersebut menunjukkan bahwa kombinasi indikator efisiensi, efektivitas PAD, dan kemandirian relevan untuk menjelaskan variasi alokasi belanja modal pada sampel penelitian.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini berbeda dari ekspektasi awal yang mengasumsikan efisiensi akan memperluas ruang fiskal untuk investasi. Perlu dibedakan antara efisiensi sebagai kualitas pengelolaan dan rasio efisiensi yang digunakan sebagai ukuran numerik, karena rasio yang meningkat berarti realisasi belanja semakin besar dibandingkan pendapatan. Dengan demikian, arah negatif justru konsisten dengan interpretasi bahwa kenaikan rasio dapat mencerminkan tekanan pengeluaran yang mengurangi ruang bagi belanja modal. Temuan tersebut memperkaya hasil studi sebelumnya yang menempatkan efisiensi sebagai salah satu indikator penting kinerja keuangan pemerintah daerah (Zulkarnain et al., 2019; Hummel & Kusumasari, 2026).

Efektivitas PAD juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini tidak sejalan dengan sebagian penelitian terdahulu yang menemukan hubungan positif antara efektivitas PAD dan belanja modal, tetapi sejalan dengan temuan bahwa hubungan indikator keuangan daerah dengan struktur belanja dapat berbeda menurut karakteristik daerah dan periode pengamatan. Efektivitas PAD menunjukkan keberhasilan mencapai target penerimaan, bukan secara langsung menunjukkan berapa besar PAD yang



tersedia untuk investasi. Karena itu, peningkatan efektivitas dapat berjalan bersamaan dengan pemenuhan belanja operasi, pelayanan publik, atau kewajiban lainnya sehingga proporsi belanja modal tidak selalu meningkat (Wahyuni & Ardini, 2018; Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021).

Kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD relatif terhadap transfer belum tentu meningkatkan proporsi belanja modal. Temuan tersebut penting dalam konteks Aceh karena kapasitas fiskal dan struktur pendapatan antardaerah berbeda. Kemandirian yang lebih tinggi dapat memberi fleksibilitas fiskal, tetapi keputusan akhir mengenai belanja modal tetap dipengaruhi prioritas pembangunan, belanja operasi, kebutuhan pelayanan, dan komposisi APBD. Dengan demikian, kemandirian fiskal sebaiknya tidak dipahami sebagai satu-satunya penentu alokasi investasi publik.

Secara simultan, efisiensi, efektivitas PAD, dan kemandirian berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini mendukung pandangan bahwa alokasi belanja modal merupakan hasil interaksi berbagai dimensi kondisi fiskal, bukan hanya satu indikator pendapatan. Studi terbaru mengenai pemerintah daerah Indonesia juga menekankan pentingnya kapasitas fiskal, efisiensi pengelolaan anggaran, dan struktur pendapatan dalam menjelaskan kinerja keuangan serta kemampuan pembiayaan pembangunan (Sukma & Hendaris, 2026; Ayuningtyas et al., 2025).

KESIMPULAN

- Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama 2019–2023.
- Rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.
- Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.
- Secara simultan, rasio efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Nilai R^2 sebesar 0,826 menunjukkan bahwa 82,6% variasi alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.
- Implikasinya, pemerintah kabupaten/kota di Aceh perlu memandang peningkatan PAD dan kemandirian fiskal bersama-sama dengan pengendalian struktur belanja dan penetapan prioritas investasi publik. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel transfer, belanja operasi, SiLPA, ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, serta metode data panel yang secara eksplisit menangani karakteristik lintas daerah dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah. (Rujukan sebagaimana tercantum dalam skripsi).
- Anynda, R., & Hermanto, S. B. (2020). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio keuangan. (Rujukan sebagaimana tercantum dalam skripsi).



- Ayuningtyas, R., Nuha, G. A., et al. (2025). Determinants of Regional Financial Independence: A Study of Local Taxes, Balancing Funds and Capital Expenditure in East Java (2020–2023). *Jurnal Riset Akuntansi dan ...*
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRAT/article/view/31712>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah. (Rujukan sebagaimana tercantum dalam skripsi).
- Hummel, D., & Kusumasari, B. (2026). Local government financial performance and decentralization in Indonesia. *State and Local Government Review*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0160323X251364379>
- Kusumaningrum, & Sugiyanto. (2021). Pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal. (Rujukan sebagaimana tercantum dalam skripsi).
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Marlina, et al. (2017). Kinerja keuangan dan alokasi belanja modal di Aceh. (Rujukan sebagaimana tercantum dalam skripsi).
- Sukma, I. T., & Hendaris, R. B. (2026). The Role of Audit Opinion in Enhancing the Influence of Local Revenue and Capital Expenditure on the Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Social and Economics*. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/9013>
- Wahyuni, & Ardini. (2018). Pengaruh efektivitas PAD terhadap belanja modal pemerintah daerah. (Rujukan sebagaimana tercantum dalam skripsi).
- Zulkarnain, et al. (2019). Pengaruh rasio keuangan terhadap belanja modal. (Rujukan sebagaimana tercantum dalam skripsi).
- Catatan penyuntingan: naskah ini disusun dari isi skripsi dan disesuaikan dengan struktur Template JIMU. Beberapa metadata bibliografi yang tidak tersedia lengkap di skripsi sengaja tidak direka-reka dan perlu dilengkapi dari Mendeley/Zotero sebelum submit.*
- JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin | ISSN: 3031-9498 (Online)